



# LAPORAN KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL KOMPILASI DATA KEPESERTAAN BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI TAHUN 2024

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kegiatan Statistik Sektoral Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penyajian data statistik sektoral di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sepanjang tahun 2024. Penyusunan laporan ini juga bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengambilan kebijakan berbasis data di Mahkamah Konstitusi. Data dan informasi yang dihimpun dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang akurat dan bermanfaat bagi berbagai pihak, baik di internal Mahkamah Konstitusi maupun eksternal, dalam rangka penguatan tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan statistik sektoral Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan pendidikan di Tahun 2024. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendukung visi dan misi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Bogor, 10 Januari 2025

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

**Mundiri**



## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>  | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR GRAFIK.....</b>  | <b>iv</b>  |
| <b>A. PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>   |
| <b>B. DASAR HUKUM.....</b>   | <b>2</b>   |
| <b>C. STATISTIK SEKTORAL TAHUN 2024 .....</b>  | <b>3</b>   |
| <b>1. Indikator Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi ....</b>                                   | <b>3</b>   |
| <b>2. Indikator Tingkat Pemahaman Peserta Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Konstitusi .....</b>           | <b>10</b>  |
| <b>3. Indkator Tingkat Kepuasan Peserta Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Konstitusi .....</b>             | <b>14</b>  |
| <b>4. Indikator Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Konstitusi.....</b> | <b>16</b>  |
| <b>D. PENUTUP.....</b>   | <b>19</b>  |



## **DAFTAR TABEL**

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1. Jumlah Peserta Berdasarkan Kegiatan .....   | 3  |
| Tabel 2. Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin.....   | 4  |
| Tabel 3. Jumlah Peserta Berdasarkan Pendidikan .....   | 5  |
| Tabel 4. Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah .....   | 6  |
| Tabel 5. Jumlah Peserta Berdasarkan Kategori Umur .....  | 9  |
| Tabel 6. Jumlah Peserta Berdasarkan Kategori Target Grup.....  | 10 |
| Tabel 7. Tingkat Pemahaman Peserta Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara<br>Konstitusi .....           | 12 |
| Tabel 8. Tingkat Kepuasan Peserta Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara<br>Konstitusi .....            | 15 |
| Tabel 9. Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Bimbingan Teknis Hukum Acara<br>Penanganan Perkara Konstitusi..... | 18 |



## DAFTAR GRAFIK

|  |    |
|--|----|
| Grafik 1. Perbandingan Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin .....  | 5  |
| Grafik 2. Perbandingan Jumlah Peserta Berdasarkan Pendidikan .....   | 6  |
| Grafik 3. Perbandingan Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah .....   | 8  |
| Grafik 4. Perbandingan Jumlah Peserta Berdasarkan Kategori Umur.....   | 9  |
| Grafik 5. Perbandingan Jumlah Peserta Berdasarkan Kategori Target Grup .....   | 10 |
| Grafik 6. Perbandingan Skor Tingkat Pemahaman Peserta Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Konstitusi.....        | 13 |
| Grafik 7. Perbandingan Skor Tingkat Pemahaman Peserta Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Konstitusi.....        | 13 |
| Grafik 8. Perbandingan Tingkat Kepuasan Peserta Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Konstitusi.....              | 16 |
| Grafik 9. Perbandingan Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Konstitusi ..... | 19 |



**LAPORAN KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL  
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
TAHUN 2024**

**A. PENDAHULUAN**

Statistik merupakan sesuatu yang sangat penting bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, statistik didefinisikan sebagai data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Sedangkan statistik merupakan adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengatur bahwa kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam mendukung pelaksanaan statistik sektoral di Mahkamah Konstitusi berperan sebagai produsen data mengenai Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi. Dalam pelaksanaan kegiatan statistik sektoral tahun 2024, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selalu berpedoman pada regulasi yang dikeluarkan oleh BPS dan Mahkamah Konstitusi, termasuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Data yang dihasilkan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi merupakan data kompilasi produk administrasi mengenai Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 sebanyak 20 kegiatan.

Terdapat 4 indikator yang dihasilkan pada kegiatan statistik tersebut yaitu jumlah peserta bimbingan teknis penanganan perkara konstitusi, tingkat pemahaman peserta bimbingan teknis penanganan perkara konstitusi, tingkat kepuasan peserta bimbingan teknis penanganan



perkara konstitusi, dan indeks peningkatan pemahaman peserta bimbingan teknis penanganan perkara konstitusi. 4 indikator tersebut akan disajikan pada laporan ini.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



### C. STATISTIK SEKTORAL TAHUN 2024

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Tahun 2024 telah mengajukan rekomendasi kegiatan Statistik Sektoral Kompilasi Data Kepesertaan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi. Badan Pusat Statistik telah mengeluarkan surat nomor B-561/03200/OT.130/2024 perihal Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Adapun realisasi indikator dalam kegiatan statistik sektoral sebagai berikut:

#### 1. Indikator Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Tahun 2024 telah menyelenggarakan sebanyak 20 Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi dengan Jumlah Peserta 2024 sebanyak 3.540 orang yang terdiri dari berbagai jenis target grup dengan karakteristik yang beragam. Adapun klasifikasi jumlah peserta kegiatan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 1. Jumlah Peserta Berdasarkan Kegiatan

| No. | Kegiatan  | Jumlah Peserta |
|-----|---|----------------|
| 1   | Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I        | 156            |
| 2   | Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Ikatan Alumni FH UNAND dan Wartawan             | 127            |
| 3   | Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Jawa Tengah | 102            |
| 4   | Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II       | 157            |
| 5   | Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan I                | 160            |
| 6   | Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan II               | 387            |
| 7   | Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan III              | 160            |
| 8   | Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan IV               | 391            |

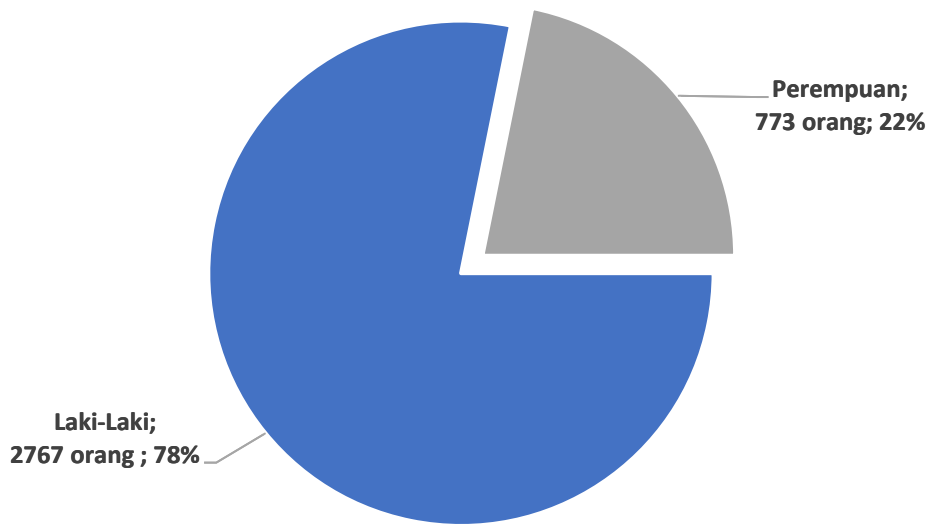


| No.          | Kegiatan   | Jumlah Peserta |
|--------------|--|----------------|
| 9            | Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan I  | 154            |
| 10           | Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan II   | 161            |
| 11           | Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan III  | 153            |
| 12           | Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angk. V  | 125            |
| 13           | Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Civitas Akademika Universitas Musamus                                    | 101            |
| 14           | Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angk. I  | 160            |
| 15           | Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Tengah dan Papua Barat Daya            | 145            |
| 16           | Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angk.II  | 139            |
| 17           | Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Prov. Jawa Timur | 318            |
| 18           | Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angk. III  | 158            |
| 19           | Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angk. IV   | 154            |
| 20           | Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Bawaslu Prov. Sumatera Barat   | 132            |
| <b>Total</b> |  | <b>3.540</b>   |

Tabel 2. Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | Jumlah       | Persentase  |
|---------------|--------------|-------------|
| Laki-Laki     | 2.767        | 78,2%       |
| Perempuan     | 773          | 21,8%       |
| <b>Total</b>  | <b>3.540</b> | <b>100%</b> |



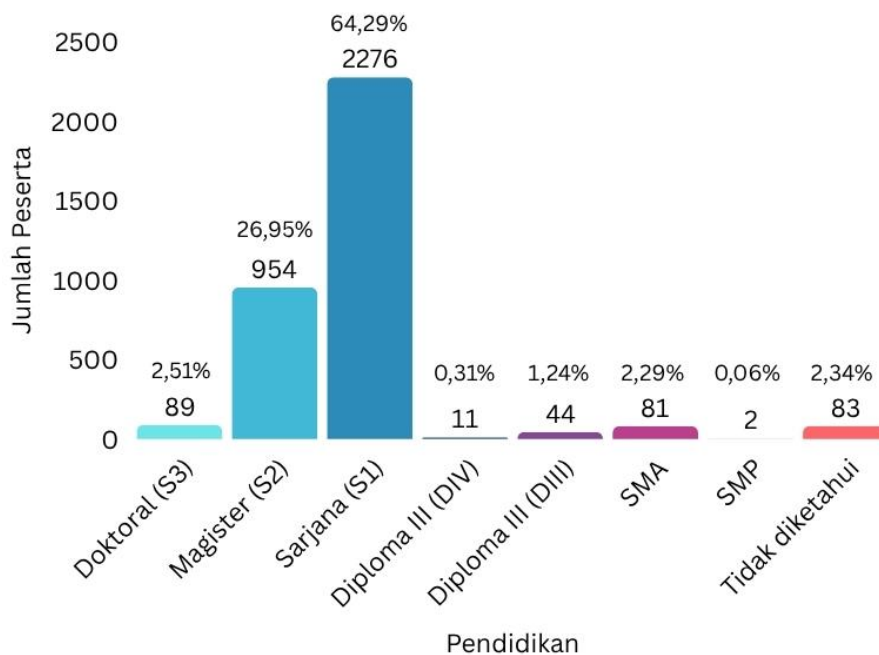


Grafik 1. Perbandingan Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3. Jumlah Peserta Berdasarkan Pendidikan

| Pendidikan         | Jumlah       | Persentase  |
|--------------------|--------------|-------------|
| Doktoral (S3)      | 89           | 2,51%       |
| Magister (S2)      | 954          | 26,95%      |
| Sarjana (S1)       | 2276         | 64,29%      |
| Diploma III (DIV)  | 11           | 0,31%       |
| Diploma III (DIII) | 44           | 1,24%       |
| SMA                | 81           | 2,29%       |
| SMP                | 2            | 0,06        |
| Tidak diketahui    | 83           | 2,34%       |
| <b>Total</b>       | <b>3.540</b> | <b>100%</b> |





Grafik 2. Perbandingan Jumlah Peserta Berdasarkan Pendidikan

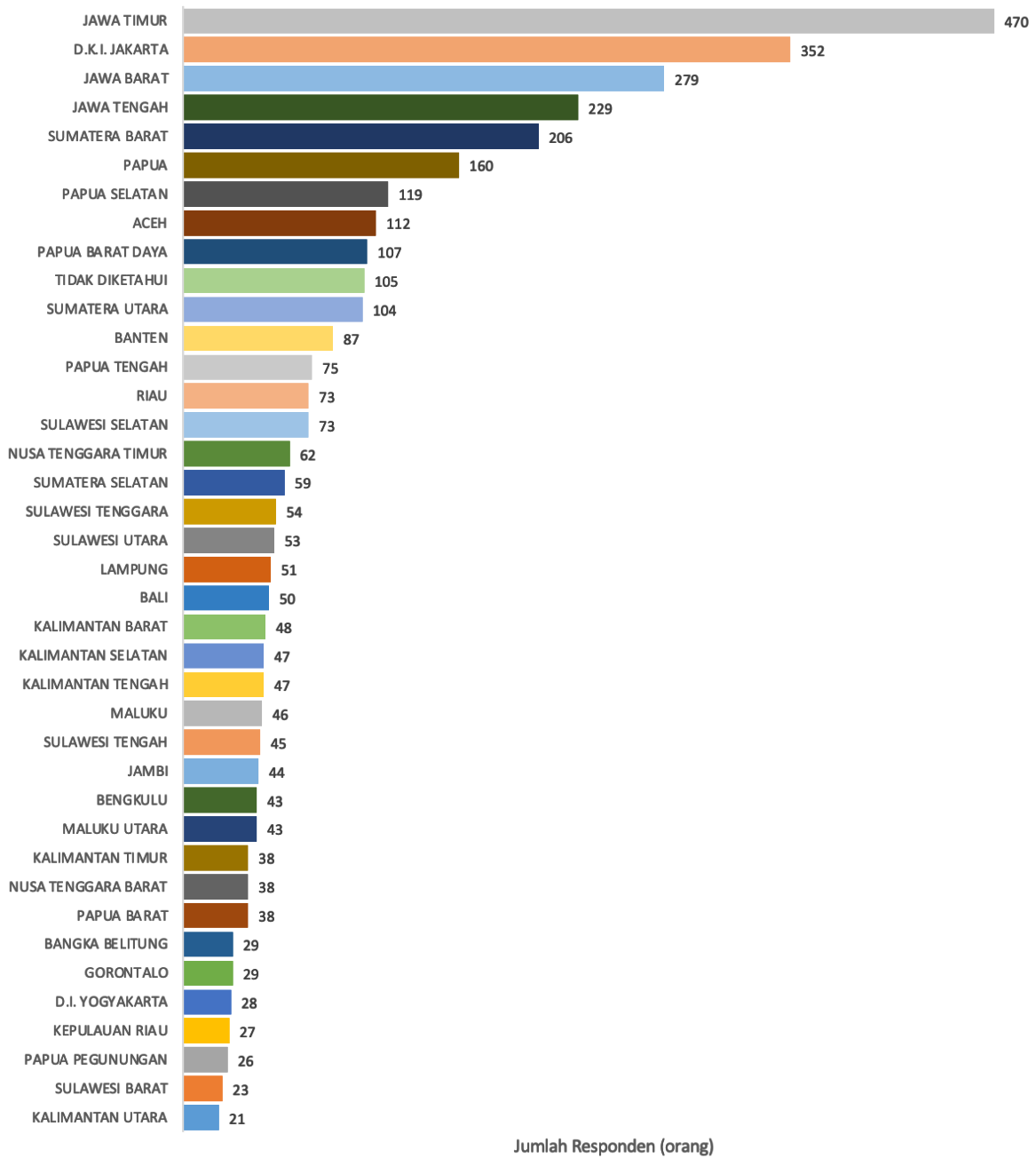
Tabel 4. Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah

| NO | ASAL WILAYAH       | KODE WILAYAH | JUMLAH |
|----|--------------------|--------------|--------|
| 1  | ACEH               | 11           | 112    |
| 2  | BALI               | 51           | 50     |
| 3  | BANGKA BELITUNG    | 19           | 29     |
| 4  | BANTEN             | 36           | 87     |
| 5  | BENGKULU           | 17           | 43     |
| 6  | D.I. YOGYAKARTA    | 34           | 28     |
| 7  | D.K.I. JAKARTA     | 31           | 352    |
| 8  | GORONTALO          | 75           | 29     |
| 9  | JAMBI              | 15           | 44     |
| 10 | JAWA BARAT         | 32           | 279    |
| 11 | JAWA TENGAH        | 33           | 229    |
| 12 | JAWA TIMUR         | 35           | 470    |
| 13 | KALIMANTAN BARAT   | 61           | 48     |
| 14 | KALIMANTAN SELATAN | 63           | 47     |



| NO | ASAL WILAYAH        | KODE WILAYAH | JUMLAH       |
|----|---------------------|--------------|--------------|
| 15 | KALIMANTAN TENGAH   | 62           | 47           |
| 16 | KALIMANTAN TIMUR    | 64           | 38           |
| 17 | KALIMANTAN UTARA    | 65           | 21           |
| 18 | KEPULAUAN RIAU      | 21           | 27           |
| 19 | LAMPUNG             | 18           | 51           |
| 20 | MALUKU              | 81           | 46           |
| 21 | MALUKU UTARA        | 82           | 43           |
| 22 | NUSA TENGGARA BARAT | 52           | 38           |
| 23 | NUSA TENGGARA TIMUR | 53           | 62           |
| 24 | PAPUA               | 91           | 160          |
| 25 | PAPUA BARAT         | 92           | 38           |
| 26 | PAPUA BARAT DAYA    | 96           | 107          |
| 27 | PAPUA PEGUNUNGAN    | 95           | 26           |
| 28 | PAPUA SELATAN       | 93           | 119          |
| 29 | PAPUA TENGAH        | 94           | 75           |
| 30 | RIAU                | 14           | 73           |
| 31 | SULAWESI BARAT      | 76           | 23           |
| 32 | SULAWESI SELATAN    | 73           | 73           |
| 33 | SULAWESI TENGAH     | 72           | 45           |
| 34 | SULAWESI TENGGARA   | 74           | 54           |
| 35 | SULAWESI UTARA      | 71           | 53           |
| 36 | SUMATERA BARAT      | 13           | 206          |
| 37 | SUMATERA SELATAN    | 16           | 59           |
| 38 | SUMATERA UTARA      | 12           | 104          |
| 39 | TIDAK DIKETAHUI     | -            | 105          |
|    | <b>TOTAL</b>        |              | <b>3.540</b> |



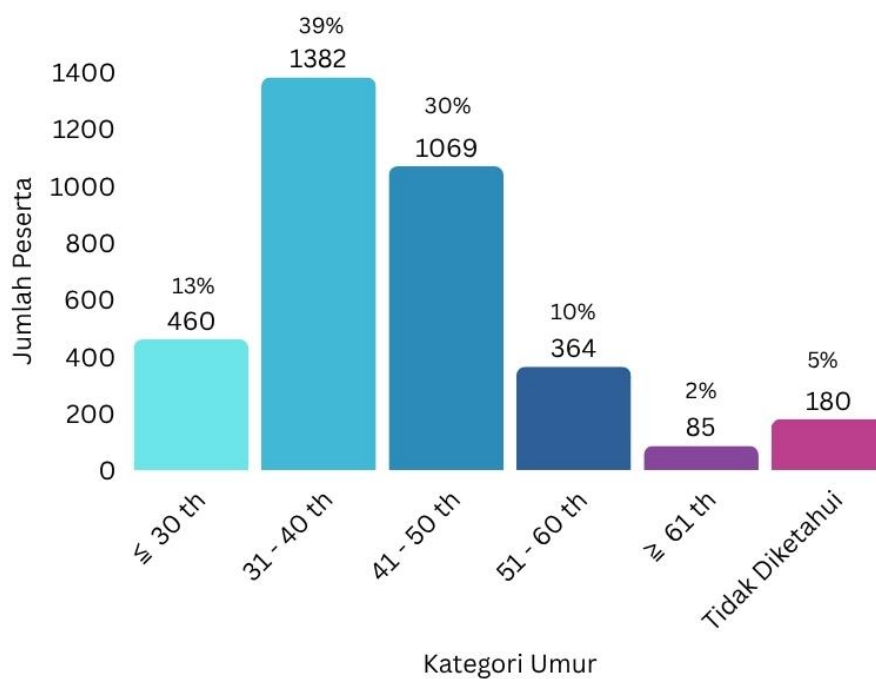


Grafik 3. Perbandingan Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah



Tabel 5. Jumlah Peserta Berdasarkan Kategori Umur

| Kategori Umur   | Jumlah       | Persentase  |
|-----------------|--------------|-------------|
| $\leq 30$ th    | 460          | 13%         |
| 31 - 40 th      | 1382         | 39%         |
| 41 - 50 th      | 1069         | 30%         |
| 51 - 60 th      | 364          | 10%         |
| $\geq 61$ th    | 85           | 2%          |
| Tidak Diketahui | 180          | 5%          |
| <b>Total</b>    | <b>3.540</b> | <b>100%</b> |

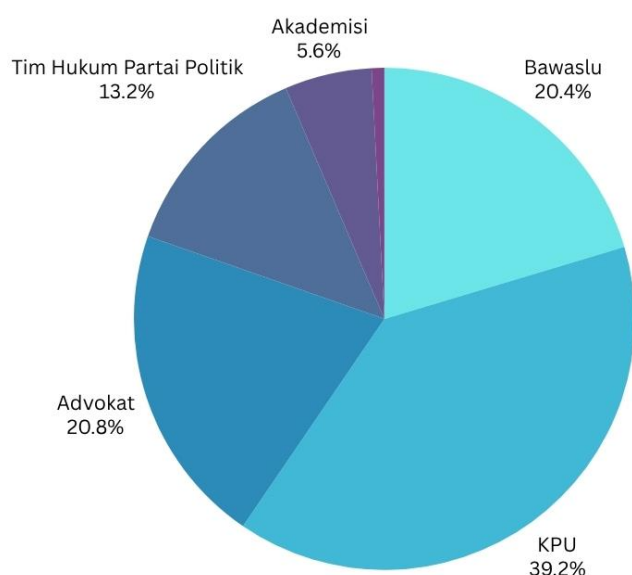


Grafik 4. Perbandingan Jumlah Peserta Berdasarkan Kategori Umur



Tabel 6. Jumlah Peserta Berdasarkan Kategori Target Grup

| Kategori Umur            | Jumlah       | Persentase  |
|--------------------------|--------------|-------------|
| Bawaslu                  | 721          | 20%         |
| KPU                      | 1387         | 39%         |
| Advokat                  | 736          | 21%         |
| Tim Hukum Partai Politik | 468          | 13%         |
| Akademisi                | 199          | 6%          |
| Wartawan                 | 29           | 1%          |
| <b>Total</b>             | <b>3.540</b> | <b>100%</b> |



Grafik 5. Perbandingan Jumlah Peserta Berdasarkan Kategori Target Grup

## 2. Indikator Tingkat Pemahaman Peserta Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menjadi bagian dari fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Beriringan dengan fungsi Mahkamah juga berfungsi dalam melindungi hak asasi manusia (*the protector of the human rights*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the constitutional citizen's right*) sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Sebagai konsekuensi



dari wewenang dan fungsinya tersebut di atas, MK memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai dasar (*core value*) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pemahaman tentang nilai dasar yang dijabarkan sebagai nilai konstitusional akan membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar negara, dan ideologi nasional.

Masyarakat akan semakin menyadari bahwa Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaannya. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Sebagai ideologi terbuka Pancasila memiliki nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis. Oleh karena itu diperlukan upaya strategis guna menjaga dan melestarikan nilai dasar Pancasila dan perwujudannya dalam nilai instrumental dan nilai praksis seiring dengan perkembangan dan dinamika masyarakat bangsa Indonesia.

Sepanjang tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, khususnya Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024. Kegiatan tersebut salah satunya bertujuan agar peserta pendidikan mampu mengetahui dan memahami hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara sebagaimana yang diatur di dalam konstitusi. Hal ini juga menjadi bagian dan implementasi misi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak. Indikator Tingkat Pemahaman Peserta Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Konstitusi diperoleh dari hasil pengukuran Pre-Test dan Post-Test.

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Apabila Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai lebih besar dari T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95%, maka analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Adapun skor yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-49: kurang); (50 – 74: cukup); (75- 94: baik); dan (94 - 100: sangat baik). Adapun Hasil Tingkat

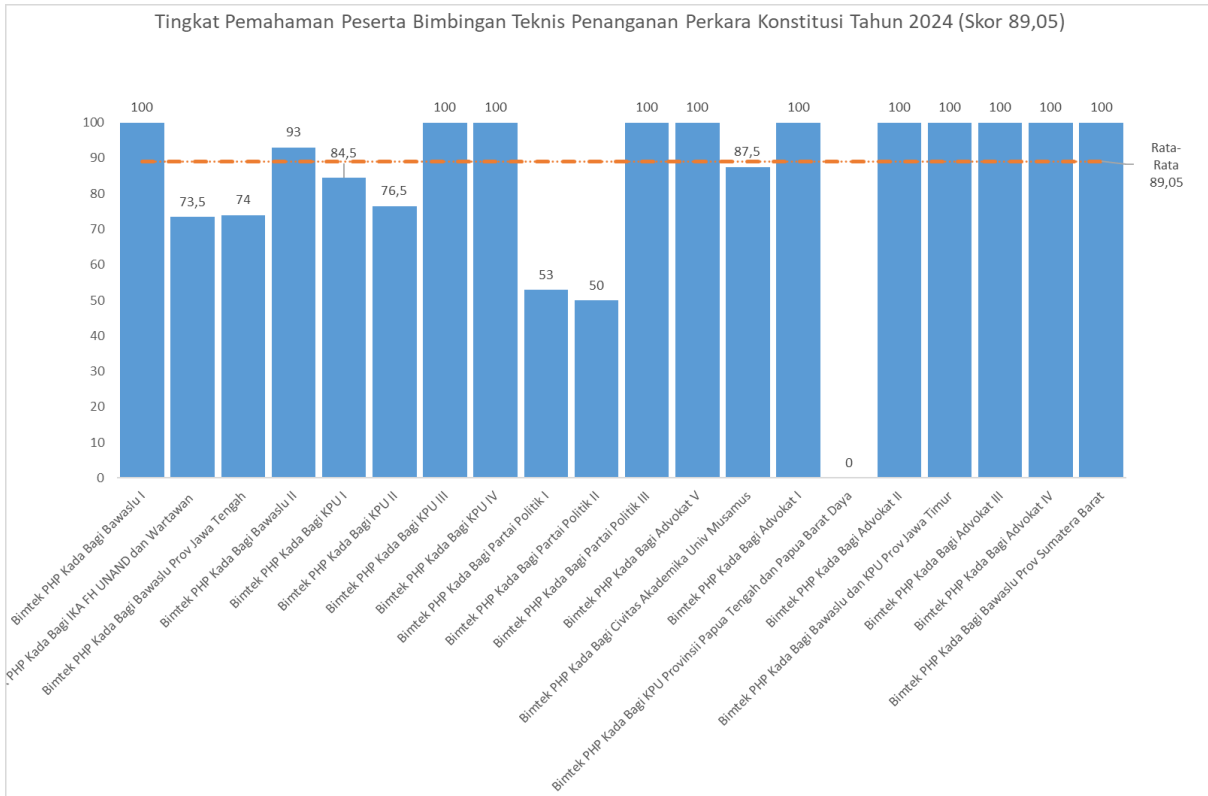


Pemahaman Peserta Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Konstitusi dapat dilihat pada tabel berikut:

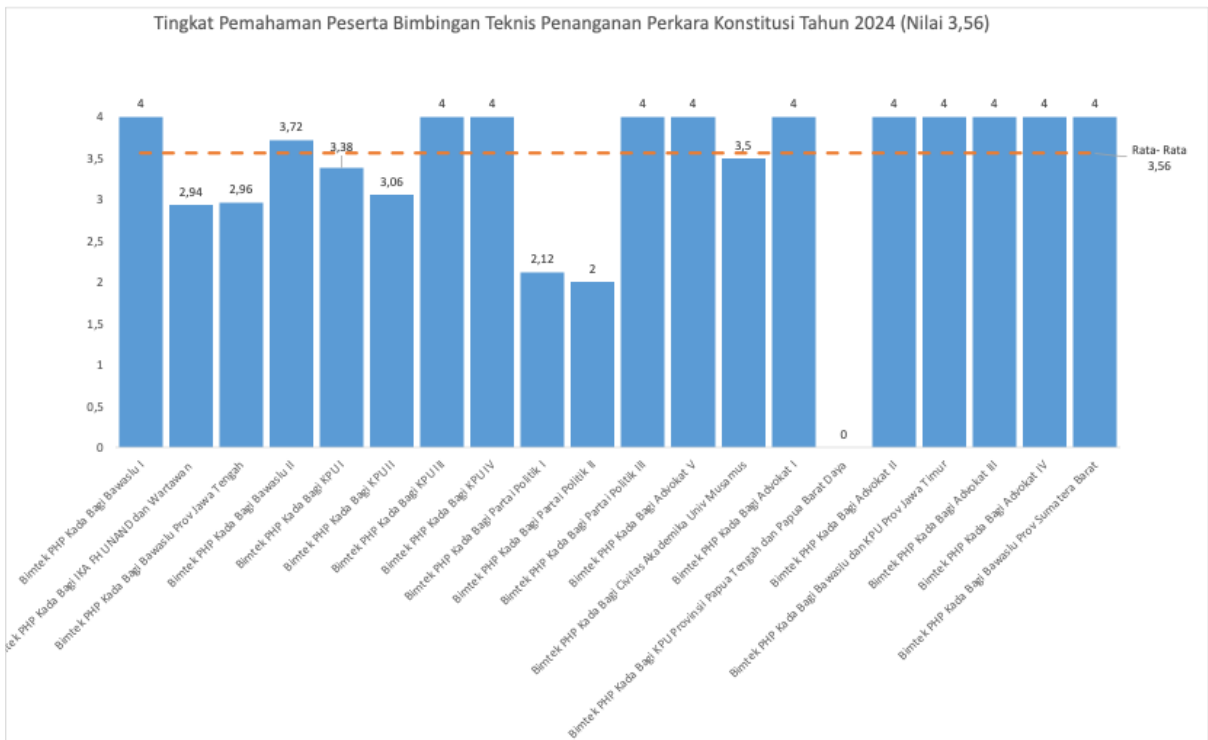
Tabel 7. Tingkat Pemahaman Peserta Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Konstitusi

| No               | Kegiatan  | Skor Tingkat Pemahaman | Nilai Tingkat Pemahaman |
|------------------|---|------------------------|-------------------------|
| 1.               | Bimtek PHP Kada Bagi Bawaslu I                                      | 100                    | 4                       |
| 2.               | Bimtek PHP Kada Bagi IKA FH UNAND dan Wartawan                      | 73,5                   | 2,94                    |
| 3.               | Bimtek PHP Kada Bagi Bawaslu Prov Jawa Tengah                       | 74                     | 2,96                    |
| 4.               | Bimtek PHP Kada Bagi Bawaslu II                                     | 93                     | 3,72                    |
| 5.               | Bimtek PHP Kada Bagi KPU I  | 84,5                   | 3,38                    |
| 6.               | Bimtek PHP Kada Bagi KPU II   | 76,5                   | 3,06                    |
| 7.               | Bimtek PHP Kada Bagi KPU III  | 100                    | 4                       |
| 8.               | Bimtek PHP Kada Bagi KPU IV   | 100                    | 4                       |
| 9.               | Bimtek PHP Kada Bagi Partai Politik I                               | 53                     | 2,12                    |
| 10.              | Bimtek PHP Kada Bagi Partai Politik II                              | 50                     | 2                       |
| 11.              | Bimtek PHP Kada Bagi Partai Politik III                             | 100                    | 4                       |
| 12.              | Bimtek PHP Kada Bagi Advokat V                                      | 100                    | 4                       |
| 13.              | Bimtek PHP Kada Bagi Civitas Akademika Univ Musamus                 | 87,5                   | 3,5                     |
| 14.              | Bimtek PHP Kada Bagi Advokat I                                      | 100                    | 4                       |
| 15.              | Bimtek PHP Kada Bagi KPU Provinsi Papua Tengah dan Papua Barat Daya | -                      | -                       |
| 16.              | Bimtek PHP Kada Bagi Advokat II                                     | 100                    | 4                       |
| 17.              | Bimtek PHP Kada Bagi Bawaslu dan KPU Prov Jawa Timur                | 100                    | 4                       |
| 18.              | Bimtek PHP Kada Bagi Advokat III                                    | 100                    | 4                       |
| 19.              | Bimtek PHP Kada Bagi Advokat IV                                     | 100                    | 4                       |
| 20.              | Bimtek PHP Kada Bagi Bawaslu Prov Sumatera Barat                    | 100                    | 4                       |
| <b>Rata-Rata</b> |   | <b>89,05</b>           | <b>3,56</b>             |





Grafik 6. Perbandingan Skor Tingkat Pemahaman Peserta Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Konstitusi



Grafik 7. Perbandingan Skor Tingkat Pemahaman Peserta Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Konstitusi



### **3. Indikator Tingkat Kepuasan Peserta Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Konstitusi**

Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga negara perihal Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Sedangkan prinsip penyelenggaraan kegiatan tersebut bertujuan pula untuk memberikan pelayanan yang utama kepada para peserta. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi meliputi Bidang Program dan Penyelenggaraan dan Bagian Umum, berusaha untuk menerapkan layanan yang mampu mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Berikut adalah uraian capaian kinerja yang diukur:

#### **1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**

Tingkat kepuasan layanan penyelenggaraan pendidikan diukur melalui kuesioner yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Kuesioner diberikan kepada peserta pendidikan pada setiap penyelenggaraan kegiatan. Tingkat kualitas layanan penyelenggaraan didapatkan dari penilaian beberapa variabel, antara lain nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar, kualitas narasumber dan moderator, kualitas metode penyelenggaraan dan kualitas petugas penyelenggaraan.

#### **2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana serta Layanan Administrasi Keuangan Peserta Kegiatan**

Seperti halnya tingkat kepuasan layanan penyelenggaraan, tingkat kualitas layanan sarana dan prasana juga didapatkan melalui kuesioner yang diberikan kepada peserta pendidikan. Penilaian didapatkan dari beberapa variabel, antara lain nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi, kualitas layanan konsumsi, kualitas layanan sarana pendidikan, layanan keamanan dan layanan keuangan.

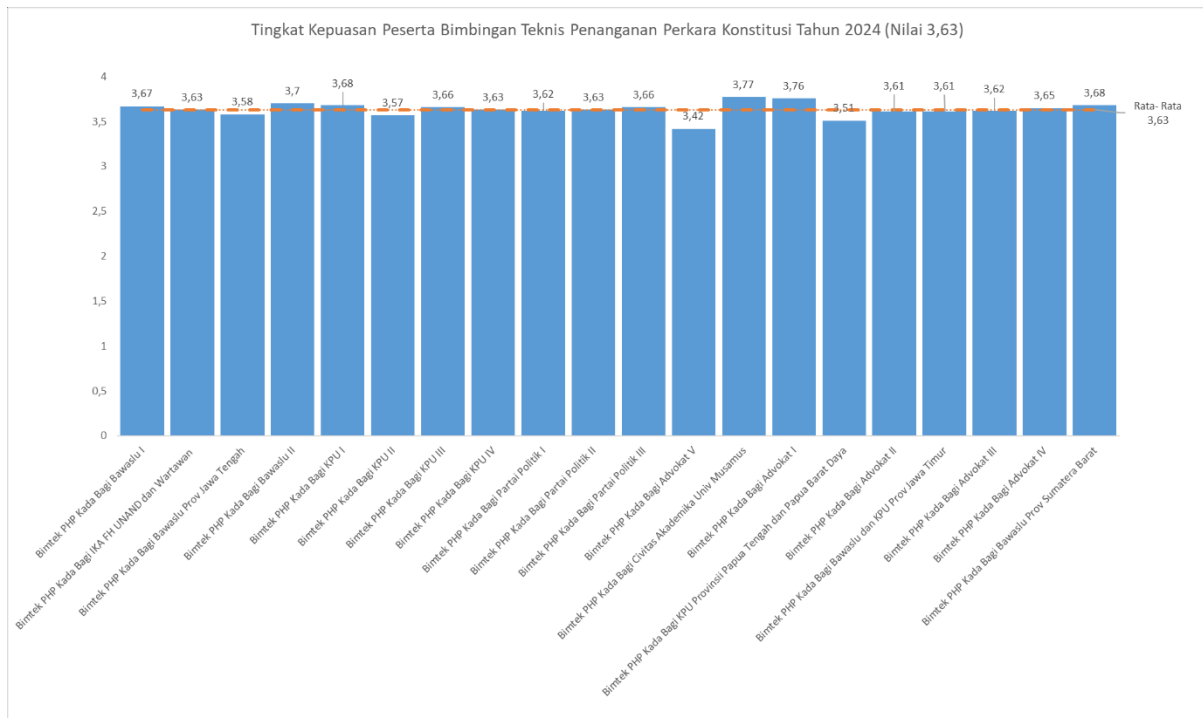
Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0). Adapun hasil evaluasi Tingkat Kepuasan Peserta Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Konstitusi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 8. Tingkat Kepuasan Peserta Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara  
Konstitusi

| No               | Kegiatan  | Tingkat Kepuasan |
|------------------|---|------------------|
| 1.               | Bimtek PHP Kada Bagi Bawaslu I                                      | 3,67             |
| 2.               | Bimtek PHP Kada Bagi IKA FH UNAND dan Wartawan                      | 3,63             |
| 3.               | Bimtek PHP Kada Bagi Bawaslu Prov Jawa Tengah                       | 3,58             |
| 4.               | Bimtek PHP Kada Bagi Bawaslu II                                     | 3,7              |
| 5.               | Bimtek PHP Kada Bagi KPU I  | 3,68             |
| 6.               | Bimtek PHP Kada Bagi KPU II   | 3,57             |
| 7.               | Bimtek PHP Kada Bagi KPU III  | 3,66             |
| 8.               | Bimtek PHP Kada Bagi KPU IV   | 3,63             |
| 9.               | Bimtek PHP Kada Bagi Partai Politik I                               | 3,62             |
| 10.              | Bimtek PHP Kada Bagi Partai Politik II                              | 3,63             |
| 11.              | Bimtek PHP Kada Bagi Partai Politik III                             | 3,66             |
| 12.              | Bimtek PHP Kada Bagi Advokat V                                      | 3,42             |
| 13.              | Bimtek PHP Kada Bagi Civitas Akademika Univ Musamus                 | 3,77             |
| 14.              | Bimtek PHP Kada Bagi Advokat I                                      | 3,76             |
| 15.              | Bimtek PHP Kada Bagi KPU Provinsi Papua Tengah dan Papua Barat Daya | 3,51             |
| 16.              | Bimtek PHP Kada Bagi Advokat II                                     | 3,61             |
| 17.              | Bimtek PHP Kada Bagi Bawaslu dan KPU Prov Jawa Timur                | 3,61             |
| 18.              | Bimtek PHP Kada Bagi Advokat III                                    | 3,62             |
| 19.              | Bimtek PHP Kada Bagi Advokat IV                                     | 3,65             |
| 20.              | Bimtek PHP Kada Bagi Bawaslu Prov Sumatera Barat                    | 3,68             |
| <b>Rata-Rata</b> |   | <b>3,63</b>      |





**Grafik 8. Perbandingan Tingkat Kepuasan Peserta Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Konstitusi**

#### **4. Indikator Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Konstitusi**

Untuk mengukur Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menggunakan pengukuran Survei Indeks Kepuasan Masyarakat. Secara garis besar, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pelayanan yaitu pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari perspektif pemberi layanan (Mahkamah Konstitusi) dan pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari perspektif pengguna layanan atau publik. Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat periode ini dilakukan dari perspektif masyarakat sebagai pengguna layanan. Variabel survei yang digunakan untuk survei layanan perkara berpedoman pada 9 (sembilan) unsur survei kepuasan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, terdiri dari: 1) Persyaratan; 2) Sistem, mekanisme dan prosedur; 3) Waktu penyelesaian; 4) Biaya/Tarif; 5) Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6) Kompetensi pelaksana, 7) Perilaku pelaksana; 8) Penanganan pengaduan, saran dan masukan; dan 9) Sarana dan prasarana.



Dalam pelaksanaan survei yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan KOKEK Consulting sebagai sebuah lembaga survei yang kredibel terhadap responden masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara diukur melalui beberapa variabel penilaian. Variabel penilaian dimaksud antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pelatihan/sosialisasi yang diselenggarakan memberikan akses yang memadai untuk mendapatkan informasi tentang hak-hak konstitusional dalam berbagai aspek (politik, ekonomi, sosial, budaya, individu);
2. Materi yang diperoleh memberikan pemahaman yang baik tentang hak-hak konstitusional sebagai warga negara;
3. Materi yang diperoleh memberikan keyakinan untuk menerapkan hak konstitusional dalam kehidupan sehari-hari.
4. Materi yang diperoleh memberikan kepercayaan bahwa hak-hak konstitusional warga negara dilindungi dengan baik oleh hukum dan lembaga terkait;
5. Materi yang diperoleh memengaruhi sikap dalam memperjuangkan atau melindungi hak konstitusional yang terancam atau dilanggar;
6. Materi yang diperoleh meningkatkan kepedulian terhadap isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak konstitusional di Indonesia;
7. Materi yang diperoleh memberikan kesadaran akan pentingnya hak konstitusional pada penguatan demokrasi di Indonesia.

Variabel diatas digunakan untuk menentukan Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara melalui pertanyaan dari setiap unsur pelayanan mulai dari kategori Sangat Puas sampai dengan Tidak Puas. Untuk kategori Tidak Puas diberi nilai persepsi 1, Kurang puas diberi nilai persepsi 2, Puas diberi nilai persepsi 3, dan Sangat Puas diberi nilai persepsi 4. Selain itu, terdapat pertanyaan terbuka untuk menjaring informasi dan masukan mengenai Hak Konstitusional yang perlu dialami oleh warga negara dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak konstitusional.

Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama - *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*. Dari keempat level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning*



(pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

n

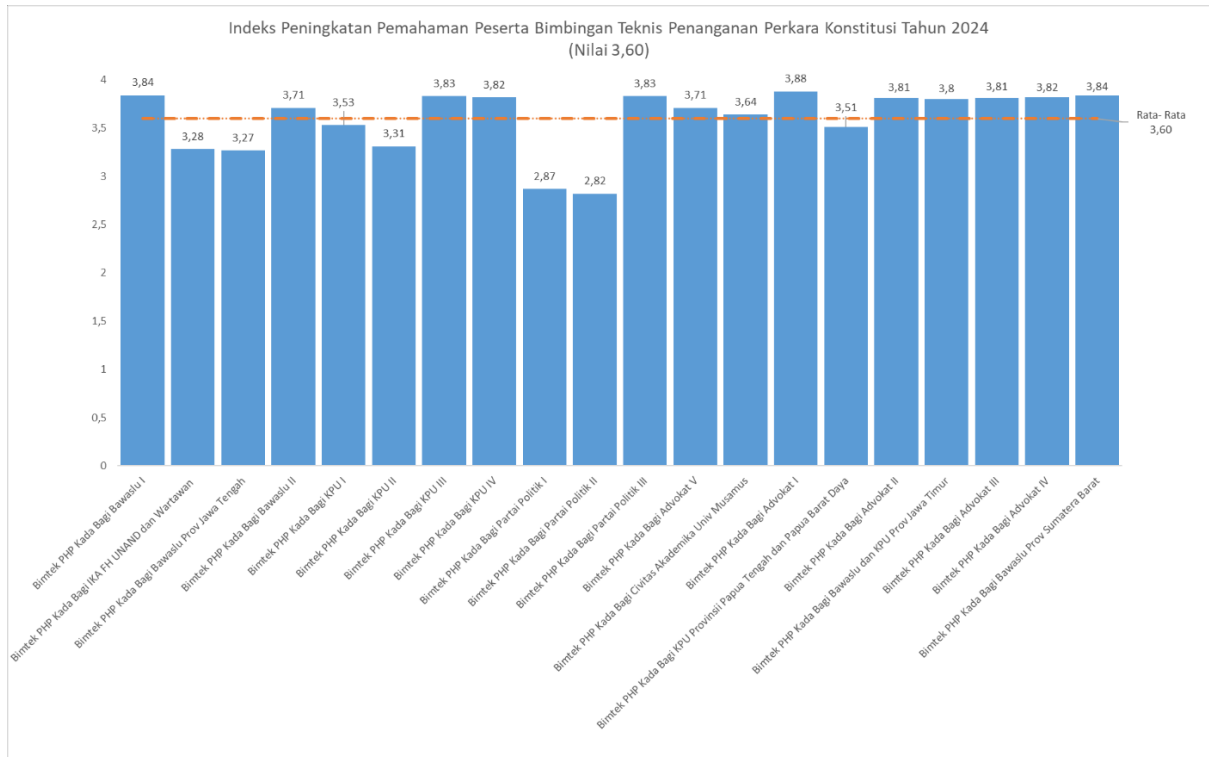
Hasil dari penghitungan Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran menggunakan dengan skala likert penilaian dengan kategori tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0). Adapun Realisasi Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Konstitusi pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Konstitusi

| No  | Kegiatan   | Indeks Peningkatan Pemahaman |
|-----|--|------------------------------|
| 1.  | Bimtek PHP Kada Bagi Bawaslu I                                       | 3,84                         |
| 2.  | Bimtek PHP Kada Bagi IKA FH UNAND dan Wartawan                       | 3,28                         |
| 3.  | Bimtek PHP Kada Bagi Bawaslu Prov Jawa Tengah                        | 3,27                         |
| 4.  | Bimtek PHP Kada Bagi Bawaslu II                                      | 3,71                         |
| 5.  | Bimtek PHP Kada Bagi KPU I   | 3,53                         |
| 6.  | Bimtek PHP Kada Bagi KPU II  | 3,31                         |
| 7.  | Bimtek PHP Kada Bagi KPU III   | 3,83                         |
| 8.  | Bimtek PHP Kada Bagi KPU IV  | 3,82                         |
| 9.  | Bimtek PHP Kada Bagi Partai Politik I                                | 2,87                         |
| 10. | Bimtek PHP Kada Bagi Partai Politik II                               | 2,82                         |
| 11. | Bimtek PHP Kada Bagi Partai Politik III                              | 3,83                         |
| 12. | Bimtek PHP Kada Bagi Advokat V                                       | 3,71                         |
| 13. | Bimtek PHP Kada Bagi Civitas Akademika Univ Musamus                  | 3,64                         |
| 14. | Bimtek PHP Kada Bagi Advokat I                                       | 3,88                         |
| 15. | Bimtek PHP Kada Bagi KPU Provinsii Papua Tengah dan Papua Barat Daya | 3,51                         |
| 16. | Bimtek PHP Kada Bagi Advokat II                                      | 3,81                         |
| 17. | Bimtek PHP Kada Bagi Bawaslu dan KPU Prov Jawa Timur                 | 3,8                          |



|                  |  |             |
|------------------|--|-------------|
| 18.              | Bimtek PHP Kada Bagi Advokat III                 | 3,81        |
| 19.              | Bimtek PHP Kada Bagi Advokat IV                  | 3,82        |
| 20.              | Bimtek PHP Kada Bagi Bawaslu Prov Sumatera Barat | 3,84        |
| <b>Rata-Rata</b> |  | <b>3,60</b> |



Grafik 9. Perbandingan Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Konstitusi

#### D. PENUTUP

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral sebagai upaya menyediakan informasi yang spesifik dan relevan mendukung tugas-tugas Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi itu sendiri, Mahkamah Konstitusi, dan bagi publik secara umum. Statistik yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan data yang dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan efektif sekaligus merupakan bagian dari upaya untuk membangun dan memperkuat sistem statistik nasional.

